**ARTIKEL**

**KEMISKINAN NELAYAN SUKU BAJO**

**(Analisis Kemiskinan Struktural di Desa Tambuna Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar)**

**SAHRUL**

******

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2016**



KEMISKINAN NELAYAN SUKU BAJO

(Analisis Kemiskinan Struktural di Desa Tambuna Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar)

*THE POVERTY OF FISHERMAN IN BAJO*

*(Analisis of Structural Poverty in Tambuna Village of Taka Bonerate District Selayar City)*

Sahrul

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh nelayan suku Bajo selama ini adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur melalui hubungan (relasi) *patron-client*. Struktur yang secara sadar mengeksploitasi nelayan yang ada di desa Tambuna guna mendapatkan keuntungan dari hasil tangkap mereka. Layaknya kapitalisme pemilik modal mejalankan perannya dengan cara: (i) Pemberian modal: modal dalam relasi patron-client antara pemilik modal dngan nelayan berbentuk hutang yang menjadi awal terjalinnya perjanjian antar mereka, (ii). Pengendalian harga: komoditas (ikan) yang dihasilkan nelayan dihargai murah oleh pemilik modal dan menjualnya kembali dengan harga yang mahal, (iii) Sistem bagi hasil: dalam sistem bagi hasil nelayan dengan pemilik modal menguntungkan satu pihak dimana pemilik modal medapatkan bagian yang lebih banyak dari nelayan, (iv) Kebijakan pemerintah (Superstruktur): kebijakan sepihak pemerintah tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat kelas menengah dan bawah mempengaruhi pendapatan nelayan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Struktural, Resolusi, Pengentasan

ˡ Mahasiswa Program Pasca Serjana Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2014.

*POVERTY OF BAJO TRIBE FISHERMAN*

*(Analysis of Structural Poverty at Tambuna Village In Taka Bonerate Sub-District of Kepulauan Selayar District)*

Sahrul

ABSTRACT

The results of the research revealed that the poverty of Bajo tribe was caused by structural trough patron-client relation. Just like capitalism, the capital owners played the role by: (i). Providing the capital: Capital in patron-client relation between the capital owners and the fisherman in a form of debt as a start of intertwining agreemen between them, (ii) Controlling price: The community (fish) produced by the fishermen was bought under the normal price by the capital owners and the capital owners sold it with expensive price, (iii). Profit sharing system: in profit-sharing system between the fisharmen and the capital owners, it just benefited one party where the capital owners gained more parts than the fisherman, (iv). Government policy (Superstructure): Unilateral policy of the government without considering the condition of middle class and low community influenced the fishermen income.

Keyword : *Poverty, Structural, Resolution, Alleviation*

ˡ The Post Graduate Student of Sociology Department Makassar State University, 2014 generation

1. **PENDAHULUAN**

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 133.622 ditahun 2015 dengan tingkat kemiskinan keadaan Maret 2015 berjumlah 18,2 ribu atau 14,23% dari total penduduk skala kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Taka Bonerate merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 13.112 ribu jiwa. Untuk skala kecamatan angka kemiskinan yang disumbangkan oleh Kecamatan Taka Bonerate mencapai 9.577 atau 76.17%. Desa Tambuna memiliki jumlah penduduk 1.138 jiwa dengan tingkat kemiskinannya mencapai; 1018 jiwa atau 89,45% dan 11,55% masyarakat tergolong sejahtera. (BPS 2015). Suku Bajo yang mendiami desa Tambuna notabene merupakan penduduk asli Pulau Tambuna yang berprofesi sebagai nelayan. Berbicara masyarakat nelayan sudah pasti berbicara masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil laut.

Dalam masyarakat ada stratifikasi atau kelas, stratifikasi inilah yang disebut oleh Karl Marx sebagai kelas sosial, dimana dalam masyarakat pada dasarnya hanya ada dua kelas sosial yaitu pekerja (*proletar*) dan pemilik modal (*borjuis*). Menurut teori struktur fungsional Geoge Ritzer (2012) menyatakan bahwa semua sistem yang ada dalam masyarakat fungsional terhadap sistem lainnya. Pemilik modal fungsional terhadap nelayan karena nelayan sendiri membutuhkan modal untuk menunjang pekerjaan mereka sedangkan nelayan fungsional terhadap pemilik modal karena disana dapat kita jumapai eksploitasi masyarakat nelayan yang mereka tidak sadari.

Kemiskinan struktural disebabkan oleh dua faktor yaitu struktur dan super struktur, dimana struktur adalah startifikas atau kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat yang karena relasi yang dibangun antara nelayan dan pemilik modal sehingga hubungan *Patron Clien* dibangun atasdasareksploitasi. Super struktur adalah istansi pemerintah dan jajaran pemerintah dengan sengaja mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak adil dan pembangunan yang tidak merata terhadap masyarakat miskin sehingga kemiskinan barupun timbul dan bertambah.

1. **TINJAUAN PUSTAKA**
2. Fungsionalisme structural

Fungsionalisme Struktural Parsons mengenal empat fungsi penting untuk semua sistem dan terkenal dengan istilah AGIL. Fungsi-fungsi penting tersebut ialah Adaptation, Goal Atteinment, Integration, dan Latency. Berangkat dari teori tersebut dapat dinyatakan bahwa kemiskinan salah satu unsur dalam sistem sosial, artinya keberadaan orang miskin dapat menjaga eksistensi dari unsur lain dalam suatu sistem, dengan perkataan lain bahwa keberadaan orang miskin memperkuat posisi mereka sebagai orang kaya.  Kemiskinan akan tetap ada sampai fungsi kemiskinan itu hilang dalam sistem sosial.

1. Strukturasi

Anthony Giddens adalah tokoh yang mempopulerkan teori srtukturasi, salah satu usahanya adalah menggabungkan agensi dan struktur. Giddens melankagh begitu jauh dengan mengatakan, “setiap penyeledikan riset di dalam ilmu-ilmu sosial atau sejarah terlibat di dalam menghubungkan tindakan (sering digunakan secara sinonim dengan agensi) dengan struktu, tidak ada pengertian ketika struktur ‘menentukan’ tindakan atau sebalikny. Paling penting dalam gagasan strukturasi ialah dualitas struktur yang secara logis disiratkan dalam argument-argumen yang dikemukakan di atas. Pembentukan agen- agen dan struktur-struktur bukanlah dua gugus fenomena tertentu yang terpisah, yakni dualism, melainkan menggambarkan suatu bentuk dualitas. Menurut gagasan dualitas struktur sifat-sifat struktual sistem sosial keduanya merupakan media dan hasil praktek-praktek yang mereka organisasikan secara rekursif. Struktur tidaklah bersifat eksternal bagi individu-iddividu, sebagai jejak-jejak memori dan seperi yang diwujudkan dalam praktek-praktek sosial, namun dalam pengertian tertentu ia lebih bersifat ‘internal’ bukannya eksternal bagi aktivitas-aktivitasnya dalam pengertian Durkheim dengan fakta sosial. Struktur tidak disamakan dengan kekangan namun selalu mengekang dan membebaskan. Tentu saja hal ini tidak mencegah sifat-sifat terstruktur sistem sosial untuk melebar mauk ke dalam ruang dan waktu di luar kendali aktor-aktor individu, juga tidak ada kompromi terhadap kemungkinan-kemungkinan bahwa teori sistem sosial para aktor dibantu ditetapkan kemabali dalam aktivitasaktivitasnya bisa merealisasikan sistem-sistem itu. Reifikasi hubungan-hubungan sosial atau naturalisasi diskursif keadaan-keadaan yang bergantung secara historis pada produk-produk tindakan manusia merupakan salah satu dimensi utama ideology dalam kehidupan sosial (Giddens, 2011: 32).

1. Kapitalisme

**Kapitalisme** adalah istilah yang dipakai untuk menamai sistem ekonomi yang mendominasi dunia barat sejak runtuhnya feodalisme, yang bertumpuk pada modal di atas segala-galanya. Sebagai dasar pada sistem, yang disebut kapitalis ialah hubungan-hubungan di antara para pemilik pribadi atas alat-alat produksi yang non-pribadi (tanah, tambang, instalasi industri dan sebagainya, yang secara keseluruhan disebut sebagai modal atau kapital) dengan para pekerja yang biarpun bebas namun tidak punya modal, yang menjual jasa tenaga kerjanya kepada para majikan. Menurut Marx (Ritzer, 2012), apabila masyarakat dilihat secara keseluruhan akan ada dua kelas utama yang saling berhadapan dalam tatanan ekonomi kapitalis yaitu *borjuis* dan *proletar*. Borjuis adalah sekelompok pemilik sarana produksi dan pembeli tenaga kerja, sedangkan proletar adalah  sekelompok orang yang tidak memiliki sarana produksi dan hidup dari menjual tenaga kerjanya. Borjuis sama dengan kapitalis, kapitalis merupakan orang yang menghasilkan uang dengan uang. Sirkulasi bentuk kapital, yaitu Uang – Komoditas – Uang (dengan uang yang lebih besar) (M1-C-M2). Untuk menghasilkan uang dari uangnya, maka kapitalis harus membuat relasi sosial dengan proletariat dengan cara membeli tenaganya untuk dipekerjakan. Prinsip ekonomi kapitalis adalah melakukan kegiatan ekonomi dengan biaya produksi seminimal mungkin dan berusaha mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Maka, untuk meminimalkan biaya produksi, kapitalis membeli murah  tenaga proletar.

1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Bila berbicara mengenai kemiskinan, kebanyakan dari kita akan berpikiran pada kondisi yang serba kekurangan dan akses yang terbatas dalam segala bidang. Hal tersebut tentunya adalah sebuah konklusi atas pandangan umum dari orang awam dalam menafsirkan kemiskinan itu sendiri. Menurut Sajogyo, garis kemiskinan yang relevan untuk negara berkembang seperti Indonesia adalah yang langsung merefleksikan kebutuhan hidup terpenting, dalam hal ini kecukupan pangan. Kecukupan pangan ini pada gilirannya dapat terwakili oleh beras. Dengan menggunakan ukuran penghasilan senilai harga beras untuk konsumsi minimal yang layak, Sajogyo menawarkan garis kemiskinan yang lebih relevan dan realistik. Konsumsi minimal itu ia dapatkan sebagai terjemahan kebutuhan kalori yang layak (saat ini sekitar 2100 kalori). Logikanya sederhana, namun tuntas masuk akal.

1. Konsep Nelayam

Nelayan dapat diartikan sebagai orang yang hasil mata pencaharian utamanya berasal dari menangkap ikan di laut. Menurut Setyohadi (1998), nelayan dikategorikan sebagai seorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, mulai dari pancing, jala dan jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu atau jukung yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan. Namun dalam perkembangannya nelayan dapat pula dikategorikan sebagai seorang yang profesinya menangkap ikan dengan alat yang lebih modern berupa kapal ikan beserta peratan tangkapnya yang sekarang dikenal sebagai anak buah kapal (ABK). Disamping itu juga nelayan dapat diartikan sebagai petani ikan yang melakukan budidaya ikan di tambak dan keramba-keramba di pantai. Menurut Gordon (Satria, 2002) bahwa nelayan adalah orang yang melakukan penangkap ikan baik di perairan laut atau pun di perairan umum dengan menggunakan seperangkat alat tangkap ikan. Nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkap ikan di laut. Definisi ini dibuat untuk konteks masyarakat tradisional. Ketika perikanan sudah mengalami berbagai perkembangan, pelaku-pelaku dalam penangkapan ikan semakin beragam statusnya.

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat nelayan suku Bajo yang diakibatkan oleh struktur. Penelitian kualitatif deskriptif akan memberikan gambaran terhadap fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di desa Tambuna Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar yang diakibatkan oleh struktur yang ada serta resolusi teoritik pengentasan kemiskinan struktural. Penentuan informan mengguanakan teknik *purposive sampling (*pengambilan data secara sengaja berdasarkan karakteristik yaitu umur, tingkat pendidikan, pembagian kerja dan penghasilanya). Focus penelitian Kemiskinan dalam penelitian ini didefenisikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang tidak memiliki modal usaha dan jauh dari alat-alat produksi. Kemiskinan struktural dalam penelitian ini didefenisikan sebagai suatu bentuk kemiskinan yang secara sengaja diciptakan melalui relasi/hubungan dan kebijakan dalam sebuah struktur komonitas, Nelayan dalam penelitian ini didefenisikan sebagai suatu komunitas yang mana mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dengan berbagai macam alat tangkap yang ada dan difasilitasi oleh pemodal, Eksploitasi adalah sifat atau watak yang terdapat dalam diri pemodal yang mana terjadi ketidakseimbangan dan pemanfaatan tenaga nelayan dengan upah yang rendahAdapun Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
5. Hasil Penelitain
6. Peran Struktur dalam Memiskinkan Masayarakat Nelayan

Pemberian modal yaitu bagaimanaKeadaan ekonomi masyarakat nelayan yang ada di Desa Tambuna terbilang sangat rendah, ditambah lagi mereka tidak memiliki alat produksi sendiri dalam menjalankan usaha mereka menjadi nelayan. Tingginya biaya hidup dan kurangnya modal masyarakat nelayan di desa Tambuna menjadi alasan buat mereka menggantungkan penghasilan mereka kepada para pemilik modal.

Pengedalian Harga Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, harga menjadi sebuah masalah besar bagi kalangan nelayan karena harga merupakan kesepakatan yang lahir dari perjanjian antara nelayan dan pemilik modal. Harga menjadi kendali bagi pemilik modal karena semua kebutuhan nelayan akan dipenuhi termasuk alat produksi dan modal pinjaman lain. Tidak adanya jaminan bagi nelayan dalam mendapatkan akses alat produksi dan modal dari pemerintah, sehingga pemilik modal hadir dengan memudahkan para nelayan untuk mendapatkan apa yang mereka inginka asalkan mereka bersedia bekerja dan menjual tenaga mereka untuk pemilik modal.

Kebijakan Pemerintah (Superstruktur) Kebijakan pemerintah ikut mempengaruhi penghasilan para nelayan. Keluarnya berbagai kebijakan pemerintah melalui regulasi yang menekan masyarakat untuk tetap berada pada kubangan kemiskinan. Salah satu kebijakan yang mempengaruhi pendapata nelayan adalah naiknya bahan bakar solar, bensin, dan bahan bakar lainnya sehingga pengeluaran nelayan semakin membengkak.

1. Resolusi Pengentasan Kemiskinan

Hubungan *patron* *client* ini merupakan solusi bagi nelayan untuk saat ini karena mereka tidak mempunyai pilihan selain bergantung kepada pemilik modal. Tidak adanya barang berharga yang dimiliki untuk dijadikan agungan sehingga mereka hanya menawarkan tenaga mereka kepada pemodal, Sulit bagi masyarakat nelayan untuk bisa sejahtera karena untuk meminjam uang mereka harus bergantung kepada pemilik modal. Tidak adanya agungan bagi masyarakat sehingga mereka tidak memiliki akses untuk bisa mendapatkan modal pinjaman dari bank atau lembaga ekonomi, selain syarat untuk mendapatkan modal dari bank letaknyapun jauh dari desa Tambuna.

Setidaknya masyarakat sadar bahwa kerjasama yang selama ini dijalin akan memberatkan pihak dari nelayan itu sendiri. Masyarakat berharap pemerintah dapat membuat sebuah lembaga ekonomi yang berdiri di desa Tambuna dan memudahkan mereka dalam mendapatkan modal dengan bunga yang rendah. Pemilik modal selalu memudahkan apa yang menjadi kebutuhan nelayan mereka sehingga nelayan merasa nyaman sekalipun mereka sebenarnya telah tereksploitasi.

1. Pembahasan
2. Peran Struktur dalam Memiskinkan Masyarakat Nelayan
3. Pemberian Modal

Keberadaan pemilik modal dalam sebuah komunitas terutama komunitas nelayan tentu menjadikan mereka sebagai bagian dari sebuah struktur yang berkuasa. Eksitensi dan dominasi pemilik modal terhadap nelayan membuat mereka mengendalikan sistem yang ada di sekitar mereka. Keberadaan pemilik modal dalam sebuah komunitas nelayan tentu menghadirkan fungsi tersendiri bagi keberlangsungan hidup para nelayan yakni fungsi *penkreditan* ditengah tingginya kebutuhan masyarakat setempat terhadap modal dan alat-alat produksi.

Modal adalah hal yang krusial dan urgen yang harus dipersiapkan dalam dunia usaha terutama usaha perikanan yang digeluti oleh masyarakat nelayan di desa Tambuna. Tentunya tanpa modal yang memadai maka akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Proposisi dalam dunia ekonomi menyatakan bahwa semakin besar modal yang dikeluarkan maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh, semakin kecil modal yang dikeluarkan maka hasilnya juga akan sedikit.

Di dalam suatu sirkulasi kapitalis komoditas (M1-C-M2) tujuan utamanya ialah menghasilkan uang yang lebih banyak. Komoditas-komoditas dibeli untuk menghasilkan keuntungan, tidak harus untuk penggunaan. Di dalam sirkulasi kapitalis, yang diacu Marx sebagai ”*membeli* *agar* *dapat* *menjual*”. Aktor individual membeli suatu komoditas dengan uang minimal dan sebaliknya menukar komoditas itu untuk uang yang mungkin lebih banyak lagi.

Pemberian modal oleh pemilik modal tentu memiliki tujuan tertentu. Nelayan bagi pemilik modal adalah aset yang bisa dimanfaatkan untuk meraut keuntungan dengan meminjamkan beberapa modal untuk mereka bisa bekerja. Pengorbanan pemilik modal tentu harus dibayar mahal oleh nelayan dengan jaminan hasil tangkap yang mereka peroleh. Bagi pemilik modal nelayan adalah ladang eksploitasi, dengan hanya mengucurkan sebagian modal untuk membiayai biaya operasional dalam melakukan pekerjaan mereka dan pemenuhan kebutuhan keluarga mereka.

1. Pengendalian Harga Ikan

Hasil yang diperoleh nelayan adalah komoditas yang siap menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemilik modal. Komoditas yang dihasilkan nelayan dikendalikan oleh pemilik modal termasuk harga komoditas. Tentunya dengan menekan harga komoditas pemilik modal akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari modal sebelumnya.

Marx melihat nilai guna dalam sebuah komoditas, hasil yang diperoleh nelayan bukan lagi atas dasar pemenuhan kebutuhan keluarga dan tetangga mereka (*nilai* *guna*), akan tetapi hasil yang diperoleh nelayan beralih menjadi *nilai* *tukar* dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Peralihan nilai komoditas yang diperoleh nelayan tidak lepas dari semakin kompleksnya kebutuhan yang harus dipenuhi keluarganya dimasa mendatang.

Semakin kompleksnya kebutuhan dan tingginya kebutuhan hidup membuat nelayan merubah nilai suatu komoditasnya menjadi *nilai* *tukar* dan memilih menguangkan hasil yang mereka peroleh dengan harga yang murah. Hal ini akan membawa kita pada konsep sentral Marx tentang *nilai* *surplus*.

Pemodal menekan harga karena tingginya perhitungan pemilik modal sehingga harus menekan harga ikan guna mendapat keuntungan lebih dari komoditas dan kemudian melakukan ekspansi pasar dalam memasarkan komoditas yang dimiliki yang dalam konsep Marx disebut sebagai *hukum* *umum* *akumulasi* *kapitalis*. Para kapitalis berusaha mengeksploitasi para pekerja sebanyak mungkin: ”tendensi terus menerus modal adalah memaksa biaya kerja kearah...nol”, (Marx, dalam G. Ritzer 2012:120).

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah upah yang diperoleh dari hasil tangkap para nelayan. Nelayan yang menghasilkan sebuah komoditas dengan tenaga, fikiran, dan biaya yang terkuras hanya dihargai dengan upah yang rendah. Sungguh nelayan sangat tereksploitasi oleh pemilik modal yang hanya duduk santai menunggu hasil nelayan dan mendapat keuntungan yang banyak tanpa harus bekerja.

Bagi hasil yang dilakukan bukan dilihat dari seberapa bayak tenaga yang dikeluarkan nelayan tapi seberapa banyak hasil yang mereka peroleh. Kapitalis tidak berpikir kalau untuk mendapatkan hasil itu harus melalui tenaga yang dikeluarkan dan itu tidak masuk dalam hitungan bagi hasil.

Marx (G. Ritzer 2012:119),Sang kapitalis tidak tahu bahwa harga tenaga kerja yang normal juga meliputi jumlah tertentu tenaga kerja yang tidak dibayar, dan tenaga kerja yang tidak dibayar itulah sumber-sumber pendapatannya yang normal. Kategori, waktu tenaga kerja surplus, baginya sama sekali tidak ada, karena tercakup di dalam hari kerja yang normal, yang dianggap telah dia bayar di dalam upah harian.

1. Kebijakan pemerintah (Superstruktur)

Kebijakan pemerintah ikut mempengaruhi pendapatan masyarakat nelayan setempat. Pemerintah ikut menyumbang angka kemiskinan karena kebijakan yang tidak berpihak membuat masyarakat terkungkung pada kubungan kemiskinan. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kuwajiban dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak-hak dasar, ekonomi masyarakat miskin. Berdasarkan konvensi international, mandat negara untuk melaksanakan pelayanan social bersifat wajib (*obligation*). Sementara itu, mandat masyrakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat ”tanggung jawab” (*responsibility*).

Realitas yang tejadi adalah negara hadir bukan menjadi solusi bagi nelayan kecil pada khususnya tapi negara hadir seakan hanya untuk melayani individu atau kelompok yang berduit. Kebijakan dan regulasi seakan menjadi momok yang membebani masyrakat kecil terutama nelayan. Sebut saja kebijakan yang dkeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sekarang dijabat oleh Ibu Puji Astuti yakni Penerapan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela dan Tarik di Wilayah Pengelolaan Indonesia telah menimbulkan kontroversi. Penerapan kebijakan tersebut tentu akan mengganggu kestabilan ekonomi asyarakat kecil terutama nelyan.

Aturan selanjutnya Peraturan Menteri (Permen) KKP Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Larangan Penangkapan dan Ekspor Lobster, Kepiting, dan Rajungan Telur. Terakhir, penerapan Permen KKP Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pelarangan Alat Tangkap Cantrang. Pasalnya, penerapan aturan ini tanpa disertai solusi untuk nelayan.

1. **Kesimpulan**

Dari hasil analisa dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Struktur dalam Memiskinkan Masyarakat Nelayan

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di desa Tambuna Kecamatan Taka Bonerate terhadap kemiskinan struktural menghasilkan beberapa temuan, bagimana struktur kemuadian memainkan perannya dalam memiskinkan nelayan suku bajo diantaranya:

1. Pemebrian Modal
2. Pengendalian Harga
3. Sistem Bagi Hasil
4. Kebijakan Pemerintah
5. Resolusi Pengentasan Kemiskinan Struktural

Dalam pengentasan kemiskinan yang terjadi di desa Tambuna peneliti menawarkan instrument koperasi karena untuk mengatasi kemiskinan structural kita harus memutus mata rantai penyebab kemiskinan itu dengan pendekatan struktur fungsional.

1. **Saran**

Sebagai hasil penelitian, tentunnya tesis ini belum sepenuhnya mendapatkan kebenaran yang hakiki karena setiap hasil penelitian akan susuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan:

1. Pemerintah kabupaten kepulauan Selayar terutama Bupati, Camat dan kepala desa agar kiranya dapat memperhatikan masyarak nelayan tanpa membedakan satus social.
2. Pemilik modal harus menanamkan sikap saling membantu dalam kebaikan dan menerapkan sistem kerjasama yang sportif sesuai amanah UU dan Syariat.
3. Pemerintah harus memperhatikan masyarakat miskin ketika kebijakan harus keluarkan.
4. Pemerintah harus menghadirkan solusi dalam mengantisipasi kebijakan yang kontra terhadap masyarakat miskin.
5. Pemerintah harus menghadirkan pengentasan kemiskinan yang langsung menyentuh akar kemiskinan berdasarkan faktor penyebabnya yakni, pemberdayaan masyarakat nelayan, bantuan modal, menyadarkan actor (pemilik modal), dan sebisa mungkin menghadirkan koperasi sebagai instrument pengentasan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adna, Nur. 2013 *Pemberdayaan masyarakat miskin (Studi kasus PKBM Inayah Kelurahan Borong Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros)*, Makassar PPs UNM

Agus, Haryadi, (2008), *Kemiskinan, Mentalitas Budaya atau Kepincangan Struktural?*

Ala, Andre Bayo, (editor). 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty Offset.

Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, 1995, Manajemen Koperasi Teori dan Parktek,

Creswell, W Jhon.2000. Research Design Qualitatif dan Quantitative Aproaches. Delhi: SAGE Publication.

Giddens, Anthony,  2003. *Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial,* Pedati, Pasuruan.

Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi (Dasar-dasar Pembentukan Struktur Social Masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kusnadi, 2002. *Nelaya*: *Strategi adaptasi dan Jaringan Sosial. Bandung*: Humaniora Utama Press

Kusnadi, 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*, LKIS, Yogyakarta

Lubis, T. Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.

M. Surung, Yacoba. 2011 *Petani Padi Sawah dan Kemiskinan (Studi kasus di desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa),* Makassar PPs UNM

Moeljrto Tjokrominoto, 1997. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mubyarto et al., 1984. *Nelayan dan Kemiskinan*, Rajawali Pers; Jakarta.

Nawawi, Ismail, 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi.* Putra Media Nusantra, Surabaya.

Parsons, Talcott, 1990. Talcott Parsons Dan Pemikirannya (penerjemah), Hartono Hadikusumo. Pt. Tiara Wacana Jogya.

Pelras, Christian. 1981. Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis-Makassar. Ujung Pandang (Monografi).

Priyono, B. Herry, 2003. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar,* Kepustakaan Populer Gramedia, Yogyakarta.

Poloma, Margaret M, 1979. *Sosiologi kontemporer* (Penerjemah). Raja Grafindo. Jakarta.

Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto,  2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia,*Rineka Cipta, Jakarta.

Ritzer, George, 2012, *Teori Sosiologi (dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*, Edisi ke-8, Jakarta; Pustaka Pelajar

Ritzer, George, 2014, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada.

Sajogyo, Pudjiwati, 1985, *Sosiologi Pembangunan* . Pascasarjana IKIP dan BKKBN Jakarta

Salim, Emil. 1984. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, Jakarta: Inti Dayu Press

Salman, Darmawan, 2006. *Jagat Maritim: Dialektika Modernitas dan Artikulasi Kapitalisme pada Komunitas Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan,*Ininnawa, Makassar.

Sallatang, M. Arifin, 1982. *Pinggawa Sawi*, *Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil,* (Disertasi) Universitas Hasanuddin

Satori, Djam’am, dan Komariah, Aan. 2010. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Satria, A. 2002. *Pengntar SosiologiMasyarakat Pesisir.* PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Sayyid sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12 Bandung: PT Al-Ma’arif, 1988.

Sudarwati, Ninik, 2009, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan, Malang: Intimedia.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.

Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Swasono, Sri-Edi (Ed, 1987, Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia, Jakarta: UI-Press.

Suyanto, Bagong dan Karnaji, 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat*, Airlangga University Press, Surabaya.

Todaro, Michael P. 1986. *Perencanaan Pembangunan : Model dan Metode*, Intermedia, Jakarta.

*Todaro,* P, Michael, *1995*, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta.

Tohir, Kaslan A., 1955, Pelajaran Koperasi, Jakarta: Balai Pustaka.

Yulianto, Trimo, 2005. *Fenomena Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klaten (Desa Jotangan Kecamatan Bayat), Sebagai Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota*, Semarang: Universitas Diponegoro,

BKKBN, PedomanKeluarga Sejahtera dan Prasejahtera. Jakarta. BKKBN.

Sajogyo. 1994. Kemiskinan dan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.